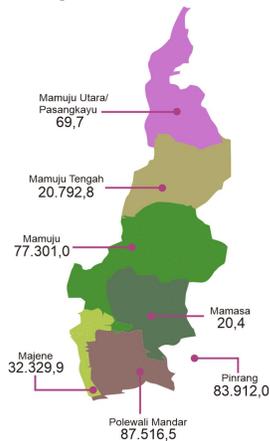


Graphical abstract



KONEKTIFITAS PELABUHAN TANJUNG SILOPO MENUJU LAHAD DATU DALAM ANALISIS POTENSI DAMPAK SOSIAL-EKONOMI

¹*Basri, ¹Chuduriah Sahabuddin, ²Firdaus Gigo Atawuwur

¹Universitas Al Asyariah Mandar
²Yayasan Peduli Insani Nusantara

*Corresponding author
basri@unasman.ac.id

Abstract

The Port of Tanjung Silopo was inaugurated as the port of embarkation and debarkation of Indonesian Migrant Workers (PMI) for Polewali Mandar to Lahad Datu, Sabah, Malaysia. This program cannot be separated from the controversy regarding the potential social and economic impacts. This study aims to analyze the potential social and economic implications of the Tanjung Silopo Harbor on the development of the region in West Sulawesi and its surroundings. The method used is descriptive analysis with case studies based on secondary data. Besides, a review of the potential for the attractiveness of economic activity is analyzed using the law of attraction, assuming populations in the immediate area. The results showed a very positive potential for the existence of the Port of Tanjung Silopo as a pioneering port for PMI Embarkation and Debarkation.

Keywords: *Tanjung Silopo, Indonesian Migrant Workers, Social, Economy.*

Abstrak

Pelabuhan Tanjung Silopo diresmikan sebagai pelabuhan embarkasi dan debarkasi Pekerja Migran Indonesia (PMI) untuk tujuan Polewali Mandar ke Lahad Datu, Sabah, Malaysia. Program ini tidak dapat dipisahkan dari kontroversi mengenai potensi dampak sosial dan ekonomi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak sosial dan ekonomi potensial dari Pelabuhan Tanjung Silopo pada pengembangan wilayah di Sulawesi Barat, dan sekitarnya. Metode yang digunakan adalah analisis deskriptif dengan studi kasus berdasarkan data sekunder. Selain itu, analisis potensi daya tarik kegiatan ekonomi dianalisis menggunakan hukum tarik-menarik yang mengasumsikan populasi di wilayah terdekat. Hasil penelitian menunjukkan potensi yang sangat positif untuk keberadaan Pelabuhan Tanjung Silopo sebagai pelabuhan perintis untuk Embarkasi dan Debarkasi PMI.

Kata kunci: *Tanjung Silopo, Pekerja Migran Indonesia, Sosial, Ekonomi*

Article history

DOI: <http://dx.doi.org/10.35329/jp.v1i2.547>

Received : 1 Agustus 2019 | Received in revised form : 24 September 2019 | Accepted : 1 Oktober 2019

1. PENDAHULUAN

Pelabuhan Tanjung Silopo yang secara geografis berada di Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar awal diresmikan merupakan pelabuhan pengumpul yang diharapkan menjadi fasilitas strategis oleh Kementerian Perhubungan di Polewali Mandar. Namun hal ini tidak begitu berdampak seiring waktu sejak mulai dioperasikan. Pelabuhan yang mulai serius dibangun tahun 2010 tersebut telah menelan anggaran hingga lebih dari 31 Milyar Rupiah [1]. Harapannya dengan adanya pelabuhan laut ini sebagai pelabuhan kategori pengumpul dapat memberikan dampak ekonomi dan sosial bagi daerah di Polewali Mandar secara khusus, dan secara umum di Sulawesi Barat.

Pemerintah Sulawesi Barat, menurut data yang ada berupaya memaksimalkan transportasi laut yang dapat mendukung transaksi perdagangan masyarakat. Namun faktanya, anggaran yang mencapai angka 31 Milyar tidak mampu memberikan dampak positif yang memberikan Pendapatan Asli Daerah yang nyata, apalagi melebihi angka tersebut. Pelabuhan Tanjung Silopo sebagai Pelabuhan Pengumpul menurut peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 61 tahun 2009 tentang kepelabuhanan, pada pasal 1 Bab I, ketentuan umum, menyebutkan bahwa Pelabuhan pengumpul merupakan pelabuhan yang memiliki fungsi pokok pelayanan kegiatan angkutan laut dalam negeri, alih muat angkutan laut dalam negeri dalam jumlah menengah, dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan atau barang, serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan antar provinsi [2].

Pelabuhan Tanjung Silopo sejak dicanangkan menjadi Pelabuhan Embarkasi dan Debarkasi Pekerja Migran Indonesia (PMI) juga menuai harapan yang sangat besar khususnya bagi pembangunan daerah [3]. Walaupun menuai kontroversi terkait status pelabuhan, namun berbagai dukungan sudah didapatkan baik dari lembaga strategis maupun Kementerian yang terkait seperti pada kementerian Perhubungan, Kementerian Hukum dan HAM melalui lembaga strategis terkait seperti Beacukai, Imigrasi, Karantina Kesehatan, dan Keamanan. Dalam hal layanan ketenagakerjaan melalui Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) telah mendukung sepenuhnya [4].

Data perkembangan saat ini didapatkan bahwa (1) telah terjalannya Kerjasama Pemerintah Sulawesi Barat dengan Pemerintah Kerajaan Negeri Sabah Malaysia berdasarkan MoU tanggal 31 Januari 2018, (2) adanya Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Barat Nomor: 188.4/252/SULBAR/IV/2018 tentang Pembentukan Tim Percepatan Kerjasama Luar Negeri antara Provinsi Sulawesi Barat Indonesia dengan Sabah Malaysia, (3) adanya Surat Rekomendasi Gubernur Sulawesi Barat Nomor: 007/2372/SET tentang Penyelenggaraan Angkutan Laut Internasional, (4) Akan beroperasinya Kapal KM Cattleya Express PT. Panca Merak Samudera Rute Pelabuhan Tanjung Silopo Polewali Mandar Sulawesi Barat menuju Pelabuhan Lahad Datu Sabah Malaysia

untuk keperluan Embarkasi dan Debarkasi Pekerja Migran Indonesia (PMI) sebagai tindak lanjut Kerjasama Pemerintah Sulawesi Barat dengan Pemerintah Kerajaan Negeri Sabah Malaysia, (5) Proses Perijinan Kapal KM Cattleya Express PT. Panca Merak Samudera berstandar internasional telah rampung, (6) Perijinan Pelabuhan Malaysia telah dikeluarkan dari Jabatan Laut Malaysia bidang Keselamatan pelayaran, (7) Perijinan Trayek telah didapatkan dari Kementerian perhubungan bidang angkutan laut luar negeri, (8) Pembentukan pelayanan CIQS (*Customs, Immigration, Quarantine, and Security*) di Pelabuhan Tanjung Silopo telah rampung, (9) Subsidi BBM untuk pengangkutan penumpang sebagai solusi promosi awal Jalur Pelayaran telah mendapat anggaran alokasi khusus dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat, dan Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar, dan (10) telah masuknya Pelabuhan Tanjung Silopo dalam pembahasan dan rencana agenda kerja perkumpulan regional empat negara, Brunei Darassalam, Indonesia, Malaysia, Philippines East ASEAN Growth Area (BIMP – EAGA) yang terjadi di Philipina pada Selasa, (24/09/2019) pukul 14.00-17.00 waktu setempat, [5], dan dilanjutkan dalam kesepakatan BIMP-EAGA Transport Ministers Meeting ke-12 yang memperkuat posisi Pelabuhan Tanjung Silopo Polewali Mandar.

Hal ini menjadikan Pelabuhan Tanjung Silopo, Sulawesi Barat sebagai gerbang pelayaran Indonesia yang akan menghubungkan sektor perdagangan, ekonomi, sosial, pariwisata, dan budaya ke seluruh dunia. Hal ini sangat mungkin melihat situasi saat ini melalui gerbang jalur tersebut segala sumber daya yang dihubungkan antara Indonesia dan Malaysia, juga berpelung besar akan terhubung ke negara-negara besar dunia seperti negara-negara eropa, India, China, dan Australia.

Evaluasi data potensi yang ada, Sulawesi Barat merupakan wilayah yang sangat kaya akan Sumber Daya Alam (SDA) yang belum terkelola dengan baik karena keterbatasan modal, infrastruktur, Sumber Daya Manusia dan manajemen [6]. Namun dibalik itu dengan ditunjang potensi yang ada serta daya tarik investor dalam maupun luar negeri di Sulawesi Barat, pertumbuhan sosial-ekonomi dapat memiliki potensi untuk berkembang dengan baik. Potensi Pelabuhan silopo tentunya menjadi peluang yang sangat besar, sehingga studi ini akan memaparkan analisis deskriptif terkait potensi sosial dan ekonomi sebagai dampak dari konektifitas Pelabuhan Tanjung Silopo Polewali Mandar, Sulawesi Barat dan Pelabuhan Lahad Datu, Sabah, Malaysia.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan Metode analisis deskriptif dengan studi kasus berdasarkan data sekunder yang didapatkan dari data Badan Statistik terkait data kependudukan, kesejahteraan, dan kinerja perekonomian. Data lainnya didapatkan melalui observasi data pada Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BP3TKI) Makassar.

Selain itu, analisis potensi daya tarik kegiatan ekonomi dianalisis menggunakan teori gravitasi pada

tahun 1956 Isard yang memperkenalkan konsep Energi Demografi (ED) yang terjadi antara dua massa populasi dimana besaran Energi Demografi berbanding lurus terhadap perkalian populasi dan berbanding terbalik dengan jarak [7]. Teknik ini dinilai cukup efektif karena potensi kegiatan ekonomi yang tentunya berpengaruh ke ranah sosial, juga tidak terlepas dari aktifitas ekonomi di beberapa daerah di wilayah terdekat [8].

Data yang dievaluasi dalam teori ED dalam penelitian ini adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) beberapa wilayah terdekat, serta jarak antar wilayah yang melintasi wilayah Pelabuhan Tanjung Silopo. Berdasar pada teori oleh Isard yang diadopsi oleh H. Kusuma didapatkan formula untuk mengukur potensial demografik, sebagaimana persamaan berikut:

$$V_i = G \cdot \sum_{j=1}^n \frac{P_j}{1+d_{ij}} \quad (1)$$

Dimana, V_i merupakan nilai Energi Demografi yang menggambarkan potensial demografik suatu wilayah, G merupakan konstanta gravitasi yang dalam hal ini dinormalisasi menjadi 1, P_j merupakan nilai PDRB di wilayah kabupaten yang diukur, serta d_{ij} merupakan jarak antar wilayah tersebut.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Potensi Pertumbuhan Ekonomi

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan dengan analisa potensi data kependudukan dan perekonomian di Sulawesi Barat, didapatkan bahwa pada tahun 2018 jumlah penduduk di Sulawesi Barat mencapai 1.355,55 (ribu) jiwa dengan laju pertumbuhan penduduk 1.85%. Jika dilihat dari pembagian wilayah, pada 6 Kabupaten di Sulawesi Barat ditambah wilayah kabupaten terdekat yaitu Kabupaten Pinrang, Provinsi Sulawesi Selatan, maka didapatkan data sebagai berikut.

Tabel 1. Data jumlah penduduk dan nilai PDRB daerah di Sulawesi Barat dan Daerah Sulawesi Selatan Terdekat

No	Nama Kabupaten	Jumlah Penduduk (ribuan)	a (KM)	b (juta)
1.	Polewali Mandar	437,66	0	12,502,190.11
2.	Mamuju Utara/ Pasangkayu	170,20	425	9,666.02
3.	Mamuju Tengah	130,83	341	2,970,170.60
4.	Mamuju	286,39	199	11,042,822.30
5.	Mamasa	159,20	98	2,763.43
6.	Majene	171,27	43	4,618,393
7.	Pinrang	374,58	71	11.987.220

Catatan: a=jarak (KM) dari Kab. Polewali Mandar, b=PDRB Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha
Sumber: Olahan data BPS 2019 [9].

Data tersebut menunjukkan bahwa PDRB di wilayah Polewali Mandar lebih tinggi dari beberapa daerah lainnya. Hal ini sesuai potensi lokasi Pelabuhan Tanjung Silopo yang berada di Kabupaten Polewali Mandar. Kawasan Pelabuhan Tanjung Silopo

dengan potensi lonjakan kegiatan ekonomi tentunya akan berdampak pada daya serap tenaga kerja. Data tahun 2018 menunjukkan angka 68.46% angkatan kerja penduduk Sulawesi Barat, artinya bahwa lebih dua pertiga usia 15 tahun atau lebih yang sudah bekerja atau sedang mencari kerja. Sementara sepertiganya bukan angkatan kerja yang ke depan sebagian berpotensi menjadi angkatan kerja berikutnya. Penyerapan tenaga kerja ke depan juga ditopang oleh data pertumbuhan PDRB Provinsi Sulawesi Barat.

Pertumbuhan ekonomi Sulawesi Barat secara *quarter-to-quarter* (q-to-q) mencapai 6.14%, *year-on-year* (y-o-y) mencapai 4.67% dan *cumulative to cumulative* (c-to-c) mencapai 4.89%. Indikator ekonomi Provinsi Sulawesi Barat selama Triwulan III 2019, diantaranya; ekonomi konsumen cukup meningkat, dengan tingkat pengangguran terbuka (TPT) meningkat dari 3.16% kondisi Agustus 2018 menjadi 3.18% pada Agustus 2019. Pada sektor industri secara q-to-q, industri besar sedang (IBS) mengalami kontraksi sebesar 3.37% sedangkan industri mikro dan kecil (IMK) bertumbuh sebesar 7.52%. Terkait aktifitas penumpang pesawat dan jumlah pelayaran nasional aktifitasnya pun mengalami peningkatan [10]. Data ini menjadikan Sulawesi Barat memiliki potensi yang juga sangat besar bagi perkembangan kegiatan ekonomi.

2. Potensi Sosial Ekonomi Terhadap Target Aktifitas Embarkasi dan Debarkasi PMI

Hasil observasi dan evaluasi dokumen dari BP3TKI Makassar, serta melalui korespondensi dan wawancara, didapatkan informasi bahwa potensi aktifitas dan pergerakan calon penumpang melalui Pelabuhan Tanjung Silopo diprediksi berasal dari selain Sulawesi Barat juga dari daerah Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, bahkan Gorontalo dan Maluku dengan estimasi pergerakan orang mencapai 8.000 orang perpekan dan kurang lebih 32.000 perbulan dengan asumsi pemberangkatan sesuai perencanaan pemerintah Sulawesi Barat hingga empat kali per bulan. Sementara arus balik dari Pelabuhan Lahad Datu Malaysia dapat mencapai kurang lebih 12.000 penumpang perbulan dari aktifitas cuti, habis kontrak, deportasi dan penumpang umum.

Potensi ini jika dilihat dari besarnya aktifitas ekonomi tentu sangat besar, melihat pergerakan orang setiap pekannya, dengan aktifitas konsumsi, perjalanan dan akomodasi lokal di Polewali Mandar. Jika menggunakan analisa per orang dengan total pengeluaran singgah di Pelabuhan Tanjung Silopo sebelum pemberangkatan, menghabiskan konsumsi dan akomodasi hingga Rp 180.000 per orang saja dalam hitungan minimum, maka besarnya perputaran uang setiap bulannya dari sisi kebutuhan calon penumpang di Pelabuhan Tanjung Silopo berpotensi mencapai angka 14.4 Milyar Rupiah, sehingga jika berlaku 5% Pajak daerah saja, maka per bulan besarnya PAD dapat mencapai 720 juta. Nilai tersebut belum termasuk retribusi lainnya.

Aktifitas pelabuhan yang saat ini hanya aktifitas Embarkasi dan Debarkasi juga berpeluang besar

untuk menyentuh aktifitas Ekspor-Import. Provinsi Sulawesi Barat dengan potensi utama bidang pertanian setidaknya memiliki tujuh komoditas utama yakni Padi (sawah dan ladang), jagung, kedelai, kacang tanah, ubi kayu, ubi jalar, dan sorgum. Pada tahun 2018 produksi Padi mencapai 326 ribu ton, Jagung 100 ribu ton, dan Kedelai 4 ribu ton. Terkhusus komoditas utama berupa beras yang menjadi kebutuhan Impor negara Malaysia dan negara tetangga lainnya, Sulawesi Barat berpeluang untuk ekspor. Data BPS menunjukkan rata-rata konsumsi beras di Provinsi Sulawesi Barat jika jumlah penduduk pada tahun 2018 dikalikan dengan kebutuhan konsumsi per-kapita nasional mencapai 111.58 Kg perbulan, maka total kebutuhan akan beras mencapai 151.25 ribu ton beras. Masih sangat surplus sekitar 174.74 ribu ton jika dibandingkan produktifitas beras di Provinsi Sulawesi Barat. Surplus ini menjadi daya tarik ekonomi yang besar bagi wilayah yang lebih luas dengan peluang untuk ekspor, walaupun faktor distribusi beras masih diabaikan. Namun, dengan manajemen dan pengendalian yang baik di sisi Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat, surplus ini dapat dimanfaatkan untuk Ekspor.

Selain dampak ekonomi tersebut, keberadaan Pelabuhan Embarkasi dan Debarkasi membawa dampak sosial yang cukup besar, data pekerja diketahui lebih 30 ribu PMI berasal dari Sulawesi Barat, dengan 75% tidak prosedural dikarenakan tidak ber-dokumen. Jumlah tersebut belum termasuk anak-anak, baik yang dibawa serta maupun lahir di Malaysia. Wawancara yang dilakukan bersama Yayasan Peduli Insani yang bergerak di bidang kemanusiaan yang banyak membantu PMI di Malaysia, menguak fakta bahwa sebagian besar merupakan siklus dari proses layanan pemerintah yang masih kurang menjangkau mereka. Lemahnya regulasi dan pengawasan serta sistem layanan menjadi faktor penyebab. Diketahui bahwa dari 75% tidak prosedural lebih dari 50% nya dikarenakan melalui perantara calo, dan habis kontrak yang tidak lagi diperpanjang.

Potensinya, keberadaan Pelabuhan Tanjung Silopo akan memangkas waktu tempuh yang selama ini rata-rata ditempuh kurang lebih 1 pekan untuk tiba di Malaysia Timur melalui beberapa persinggahan pelabuhan laut, menjadi hanya sekitar 2 hari atau sekitar 36 jam, tiba di Pelabuhan Lahad Datu dan dapat langsung menuju lokasi kerja, sehingga potensi permasalahan sosial berupa terkena *Human Trafficking*, sakit di jalan, serta kemungkinan perampasan status kependudukan PMI/ *Smuggling*, dapat terhindarkan.

Hal penunjang dalam mengatasi permasalahan sosial juga tidak terlepas dari adanya fasilitas yang disediakan oleh Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar dimana Pelabuhan Silopo Beroperasi. Diketahui bahwa saat ini Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar telah tersedia Kantor Imigrasi, Kantor Layanan PMI, Rumah Sakit untuk *medical checkup*, kantor LTSA serta tujuh perusahaan resmi penyalur PMI yang terdaftar dalam konsorsium layanan pengawasan Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (PPTKIS) di Sulawesi Barat. Berbagai layanan tersebut menjadikan keberadaan Pelabuhan

Tanjung Silopo, dapat meminimalkan masalah-masalah sosial yang selama ini terjadi, apalagi jalur pelayaran langsung, ditambah Pelayanan PMI berupa Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA) yang dicanangkan Pemprov Sulawesi Barat bersama lembaga dan kementerian terkait. Layanan yang dicanangkan di Pelabuhan Tanjung Silopo berpeluang memutus mata rantai penempatan PMI secara non Prosedural. Selain itu, dengan layanan ini, selain memudahkan Pemerintah Sulawesi Barat dalam pengawasan, juga berpeluang besar memberikan data yang akurat bagi warga Sulawesi Barat yang berprofesi sebagai PMI sehingga pemberdayaan kepada Warga PMI asal Sulawesi Barat dapat lebih mudah. Dampak lainnya, bahwa dengan jalur ini, sangat memungkinkan juga memberikan dampak sosial bagi warga PMI asal daerah sekitar, sehingga secara umum keberadaan Pelabuhan Tanjung Silopo memberikan dampak sosial yang sangat besar bukan hanya bagi Pemerintah Sulawesi Barat, namun juga berdampak secara Regional dan Nasional.

3. Energi Demografi Sebagai Potensial Demografik Pelabuhan Tanjung Silopo

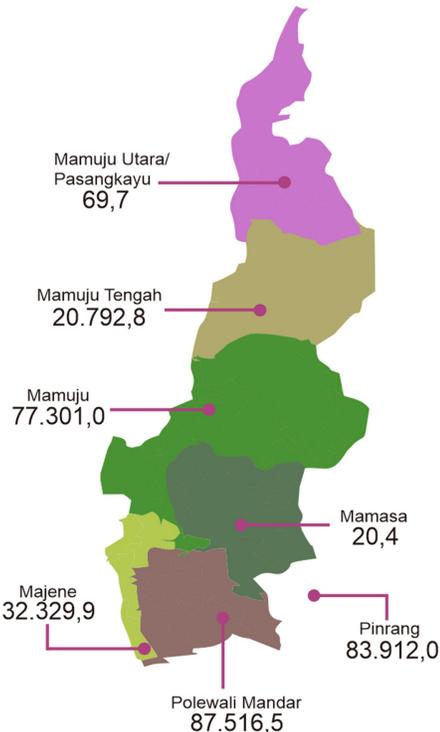
Kegiatan ekonomi masyarakat pada suatu wilayah umumnya dapat dilihat dari PDRB-nya. PDRB ini akan menggambarkan besaran output yang dihasilkan pada setiap sektor dikalikan dengan harga pada saat output atas dasar harga berlaku. Dengan demikian aktifitas di setiap daerah juga dapat tergambarkan dari PDRB ini. Perhitungan PDRB ini merupakan hasil dari kegiatan perekonomian yang beroperasi di seluruh wilayah domestik, tanpa perlu memperhatikan faktor asal produk semua barang dari atau dimiliki oleh penduduk di wilayah tersebut. Penghasilan yang timbul dari adanya kegiatan produksi tersebut menjadi pendapatan domestik. Setiap wilayah kabupaten di provinsi Sulawesi Barat dan daerah terdekat dari Pelabuhan Tanjung Silopo memiliki keunggulan yang saling melengkapi. Faktor jarak dan kegiatan ekonomi yang saling mempengaruhi menjadi faktor pendukung majunya suatu wilayah. Hal tersebut juga dapat diukur dengan Potensi Demografik yang digambarkan dalam nilai Energi Demografi. Besarnya Energi Demografi sebagaimana digambarkan dalam metodologi penelitian yang dilakukan, menunjukkan nilai yang sangat positif untuk wilayah Kabupaten Polewali Mandar dimana Pelabuhan Silopo berada.

Tabulasi nilai menggunakan persamaan (1), pada Tabel 2. Menunjukkan bahwa dari 6 Kabupaten di Sulawesi Barat ditambah 1 Kabupaten di Sulawesi Selatan (Kab. Pinrang) yang terdekat dari Pelabuhan Tanjung Silopo didapatkan nilai yang sangat positif bagi Kabupaten Polewali Mandar. Secara berurut Kabupaten Polewali Mandar memiliki ED yang sangat besar, menyusul Kabupaten Pinrang yang terdekat serta Kabupaten Mamuju sebagai Ibu Kota Provinsi. Nilai ini menunjukkan bahwa Posisi Kabupaten Polewali Mandar sangat strategis bagi pergerakan ekonomi antar wilayah, apalagi menjadi gerbang arus ekonomi Sulawesi Barat dan Sulawesi Selatan serta menuju Provinsi lainnya di Sulawesi.

Tabel 2. Analisa Potensi Demografik*

Wilayah	Polewali Mandar	Mamuju Utara/ Pasangkayu	Mamuju Tengah	Mamuju	Mamasa	Majene	Pinrang	Energi Demografi
Polewali Mandar	2.502,2	12.502,6	12.502,5	12.502,4	12.502,3	12.502,2	12.502,3	87.516,5
Mamuju Utara/ Pasangkayu	0,1	9,7	9,8	9,9	10,0	10,0	10,2	69,7
Mamuju Tengah	2.970,5	2.970,3	2.970,2	2.970,4	2.970,4	2.970,5	2.970,6	20.792,8
Mamuju	11.043,0	11.043,1	11.043,0	11.042,8	11.042,9	11.043,0	11.043,1	77.301,0
Mamasa	2,9	3,1	3,0	2,9	2,8	2,9	2,9	20,4
Majene	4.618,4	4.618,8	4.618,7	4.618,6	4.618,5	4.618,4	4.618,5	32.329,9
Pinrang	11.987,3	11.987,7	11.987,6	11.987,5	11.987,3	11.987,3	11.987,2	83.912,0

* Angka disederhanakan dalam ribuan



Gambar 1. Pemetaan Energi Demografi sebagai gambaran Pergerakan Ekonomi Wilayah

Mamuju sebagai Ibu Kota provinsi dengan nilai ED pada urutan tiga mengindikasikan nilai positif untuk jalur transportasi langsung dari Polewali Mandar ke Mamuju. Hal ini memungkinkan dengan posisi Pelabuhan Silopo yang dapat bergerak tidak hanya untuk jalur Internasional akan tetapi juga sangat direkomendasikan untuk Jalur Nasional. Bahkan jika memungkinkan, analisa ini menunjukkan bahwa rencana pemerintah Provinsi Sulawesi Barat

untuk pembangunan Bandara di Kabupaten Polewali Mandar sangatlah potensial.

Pelabuhan Tanjung Silopo yang berada di Kabupaten Polewali Mandar berpotensi sebagai salah satu kekuatan ekonomi baru. Keberadaannya tersebut tidak terlepas dari interaksi yang tinggi dengan wilayah terdekatnya, sehingga untuk Kabupaten Polewali Mandar, berpotensi menjadi sentra ekonomi baru di Sulawesi Barat dan wilayah terdekatnya. Jika di bawah ke ranah regional dan nasional, Kabupaten Polewali Mandar berpeluang besar menjadi tulang punggung untuk perekonomian di Indonesia, apalagi dengan pencaanangan Ibu Kota Baru yang akan berada di Kabupaten Panajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara (Kukar) Kalimantan Timur yang sangat berdekatan dan hanya berbatas laut di Selat Makassar dengan Provinsi Sulawesi Barat.

4. SIMPULAN

Hasil penelitian menunjukkan potensi yang sangat positif untuk keberadaan Pelabuhan Tanjung Silopo sebagai pelabuhan untuk Embarkasi dan Debarkasi PMI di wilayah Kabupaten Polewali Mandar. Analisa data yang disajikan menunjukkan potensi yang sangat besar, apalagi ditunjang posisi Kabupaten Polewali Mandar dengan tingkat perekonomian yang lebih besar dari beberapa daerah lainnya. Potensi ini juga didukung dengan ketersediaan angkatan kerja yang siap mengisi kebutuhan tenaga kerja sebagai dampak dari keberadaan pusat ekonomi baru di Sulawesi Barat tersebut. Keberadaan Pelabuhan Tanjung Silopo dengan aktifitas perpindahan orang menunjukkan angka yang sangat besar jika dilihat dari sisi potensial perputaran ekonomi yang mencapai asumsi dasar 14.4 Milyar Rupiah perbulan. Data analisis Energi Demografi juga menunjukkan hasil yang sangat positif dengan formulasi hukum gaya tarik yang menunjukkan potensial demografik yang cukup besar bagi keberadaan Pelabuhan Tanjung Silopo.

Selain itu dampak penyelesaian permasalahan sosial tidak terlepas dari peran strategis Pelabuhan Tanjung Silopo di Polewali Mandar. Permasalahan PMI di

Malaysia yang sebagian besar banyak dialami oleh warga Sulawesi Barat selama ini juga dapat terselesaikan melalui jalur langsung dan sistem manajemen pengawasan yang terkontrol sebagaimana dicanangkan oleh Pemerintah Sulawesi Barat melalui keberadaan Pelabuhan Tanjung Silopo.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Antara News, "Pelabuhan Tanjung Silopo Habiskan Rp31 Miliar - ANTARA News Makassar," <https://makassar.antaranews.com>, 2012. [Online]. Available: <https://makassar.antaranews.com/berita/43633/pelabuhan-tanjung-silopo-habiskan-rp31-miliar>. [Accessed: 12-Jan-2019].
- [2] Kemenkeu, "PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA," *kemenkeu*, 2009. [Online]. Available: <https://jdih.kemenkeu.go.id/fullText/2009/61TAHUN2009PP.HTM>. [Accessed: 12-Apr-2019].
- [3] H. N. Rohedy, "Pelabuhan Tanjung Silopo Polman Resmi Beroperasi," *rakyatku.com*, 2018. [Online]. Available: <http://news.rakyatku.com/read/85265/2018/02/01/pelabuhan-tanjung-silopo-polman-resmi-beroperasi>. [Accessed: 13-Jan-2019].
- [4] BNP2TKI, "BNP2TKI | Badan Nasional Penempatan & Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia," 2019. [Online]. Available: <http://www.bnp2tki.go.id/berita-detail/bnp2tki-dukung-pemprov-sulawesi-barat-siapkan-pelabuhan-khusus-dan-ltsa-untuk-layani-pmi>. [Accessed: 01-Nov-2019].
- [5] Suarainsani, "Jalur Lahad Datu Malaysia-Tanjung Silopo Polewali Mandar menjadi pembahasan dalam BIMP -EAGA Transport Cluster Meeting -," *suarainsani.com*, 2019. [Online]. Available: <https://suarainsani.com/2019/09/25/jalur-lahad-datu-malaysia-tanjung-silopo-polewali-mandar-menjadi-pembahasan-dalam-bimp-eaga-transport-cluster-meeting/>. [Accessed: 26-Sep-2019].
- [6] M. N. Badu, "INTERNASIONALISASI POTENSI SULAWESI BARAT (Studi Kasus: Investasi Asing di Sulawesi Barat)," *JPP (Jurnal Polit. Profetik)*, vol. 2, no. 1, 2014.
- [7] W. Isard, "Interregional and regional input-output analysis: a model of a space-economy," *Rev. Econ. Stat.*, pp. 318–328, 1951.
- [8] H. Kusuma, "MODEL KETERKAITAN WILAYAH EKONOMI DI DALAM INDONESIA PENENTUAN PUSAT," in *SEMINAR NASIONAL DAN CALL FOR PAPER III FAKULTAS EKONOMI*, 2018, pp. 189–198.
- [9] "Badan Pusat Statistik." [Online]. Available: <https://bps.go.id/>. [Accessed: 01-Aug-2019].
- [10] BPS, "Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Barat," *Badan Pusat Statistik*, 2019. [Online]. Available: <https://sulbar.bps.go.id/>. [Accessed: 03-Oct-2019].

TENTANG PENULIS



Basri menyelesaikan gelar Sarjana pada Program Studi Teknik Informatika di Universitas Al Asyariah Mandar pada tahun 2011, kemudian melanjutkan studi pada Program Studi Teknik Elektro pada Konsentrasi Teknik Informatika tahun 2013 dan selesai pada tahun 2015. Hingga saat ini telah menyelesaikan beberapa Project Riset Kompetitif pada bidang Kecerdasan Buatan khususnya pada implementasi pada Pengolahan Citra. Saat ini bekerja sebagai Dosen di Program Studi Teknik Informatika Universitas Al Asyariah Mandar, dengan tugas tambahan sebagai Direktur Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Al Asyariah Mandar.



Chuduriah Sahabuddin menyelesaikan gelar Sarjana S1 di IKIP Ujung Pandang pada Jurusan Pendidikan Bahasa Inggris lulus tahun 1994, kemudian menyelesaikan studi Magister di Universitas Hasanuddin pada jurusan Pendidikan Komunikasi dan selesai Pada tahun 2004. Selanjutnya pada tahun 2017 menyelesaikan studi Doktorat di Universitas Negeri Makassar pada jurusan Pendidikan Sosiologi. Bidang kajian riset banyak terkait pendidikan bahasa, humaniora dan sosiologi. Publikasi dari hasil Disertasi terakhir mengkaji tentang Politik Dinasti di Kabupaten Polewali Mandar. Saat ini bekerja sebagai Dosen DPK LLDIKTI Wilayah IX Sulawesi di Program Studi Bahasa Indonesia Universitas Al Asyariah Mandar, dengan tugas tambahan sebagai Rektor.



Firdaus Gigo Atawuwur menyelesaikan gelar Sarjana S1 di STAI DAARUL QOLAM Tangerang dan lulus tahun 2010, kemudian menyelesaikan studi Magister di STIE Indonesia School of Management Tangerang. Merupakan Ketua Yayasan Peduli Insani Nusantara yang banyak bergerak di bidang Kemanusiaan baik di Indonesia maupun di Negara Bagian Sabah Malaysia. Menjadi pemerhati kondisi Pekerja Migran yang saat ini mengelola belasan sekolah anak TKI di luar negeri. Aktifitasnya selain berkecimpung dalam bidang sosial kemanusiaan melalui yayasan yang didirikan, juga saat ini dipercayakan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat sebagai Staf Khusus Gubernur Bidang Tenaga Kerja dan Hubungan Kerjasama Luar Negeri